

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abrar Saleng. 2013. *Kapita Selekta Hukum Sumberdaya Alam*. Makassar: Membumi Publishing
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media Group
- Boy Rumawo. 2008. *Pembatasan Wewenang Pemerintah Terhadap Hak Ulayat yang Diatur Dalam UUPA*. Jakarta: WALHI Books.
- Chainur Arrasjid. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farida Patittingi. 2012. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Jogjakarta: Rangka Education.
- Flora Pricilla Kalalo. 2009. *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai & Laut di Indonesia Buku I*. Jakarta: Logoz Publishing.
- Hasni. 2008. *Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Irham Fahmi. 2014. *Manajemen Kepemimpinan Teori & Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ismail Solihin. 2009. *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat
- L Tri Setyawanta. 2005. *Konsep Dasar dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*. Semarang: PSHL Universitas Diponegoro.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mariangan Masry Simbolon. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prana Media Group
- M Dahuri. 2014. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.



- Sondang P Siagian. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sri Susyanti Nur. 2010. *Bank Tanah*. Makassar: As Publishing.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi ke-2 Cetakan ke-5*. Yogyakarta: Liberty.
- Suparma A Diraputra. 2011. *Sistem Hukum dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu*. Bogor: PKSPL IPB.
- T Nazaruddin. et.al. 2019. *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal di Aceh*. Aceh: Unimal Press.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Pratik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Yunus Wahid. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia group.

Jurnal

- Al Araaf Ode Pota, 2022, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Hutan di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa*, Widya Pranata Hukum, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Alvira Aslam, 2022, *Implikasi Hukum Penahanan Validasi BPHTB Terhadap Developer Sebagai Wajib Pajak Mineral*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Ardiansyah Basri, 2023, *Pemanfaatan Sungai Untuk Usaha Penyeberangan Oleh Masyarakat Desa Taeng Di Kabupaten Gowa*, Legal Brief, Volume 12 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Dirhamsyah. 2016. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terintegrasi di Indonesia*. Jurnal Oseana. Volume 31. Nomor 1.
2018. *Percepatan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah*



Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jurnal Ilmu Kelautan. Volume 2. Nomor 2.

Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia*. Jurnal Perspektif Hukum. Volume 15. Nomor 1. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.

Muhammad Ilham Arisaputra. 2013. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*. Jurnal Yuridika. Volume. 28. Nomor 2. Fakultas Hukum. Universitas Airlangga.

Karya Tulis Ilmiah

Agustine Irianti. 2011. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai Utara (PANTURA) Jakarta Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol Kepada Pihak Ketiga*. Tesis. Universitas Indonesia. Depok.

Dicky Payogo. 2022. *Pengakan Hukum Pemanfaatan Ruang Terhadap Kawasan Permukiman Di Kecamatan Panakukkang Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar*. Tesis. Univeristas Hasanuddin. Makassar.

Rina Bahar. 2017. *Implementasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Perumahan Di Kota Depok*. Skripsi. Universitas Indonesia. Depok.

Samir. 2021. *Status Hukum Tanah Hasil Reklamasi Untuk Kawasan Permukiman Masyarakat Di Pulau Bungin Nusa Tenggara Barat*. Tesis. Univeristas Hasanuddin. Makassar.

Seminar Nasional

Kasru Susilo. 2000. *Pengembangan Wilayah di Kawasan Pesisir*. Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya lam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang. niversitas Padjajaran. Bandung.



Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
25/Permen-Kp/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2011-
2031



LAMPIRAN



Lampiran 1



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 12 Majene ☎ 0422 – 21514

Nomor : 050.13/256/2023
Lamp : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Majene, 17 Oktober 2023

Kepada Yth,
Rektor Universitas Hasanuddin Makassar
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene,
Nomor 070/292/VII/2023 tentang Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama : **AMALIA WINDAYANTI TASWIN**
Nomor Pokok : B022202022
Pekerjaan : Mahasiswa S2 (Strata Dua) Kenotariatan
Alamat : Pangali Ali Kel. Pangali Ali Kec. Banggae Kab. Majene
Judul Penelitian : **Implikasi Hukum Terhadap Reklamasi Wilayah Pesisir Pantai
Pacitan Untuk Pembangunan Waterfront City di Kabupaten Majene**

Berdasarkan hal tersebut, maka yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan
Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Majene, menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut
telah selesai melaksanakan Penelitian/Observasi dan Pengambilan Data di Badan
Perencanaan Daerah Kabupaten Majene terhitung mulai tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan
tanggal 3 Oktober 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Badan,

ANDI AMRIANA CHAIRANI, SS., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Np. 19710905 199703 2 002



Optimized using
trial version
www.balesio.com



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Jenderal Ahmad Yani (Km 4) Poros Majene-Mamuju Telp.0422-21008

Majene, 14 Juli 2023

Nomor : 800/190.1/2023
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Yth. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar
Di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene menerangkan bahwa :

Nama : AMALIA WINDAYANTI TASWIN
NIM : B022202022
Program Studi : S2 Kenotariatan
Alamat : Pangali Ali Kel. Pangali Ali Kec. Banggae Timur Kab. Majene

Telah melaksanakan penelitian/observasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene sejak bulan Juli – September 2023 dengan judul : "*Implikasi Hukum Terhadap Reklamasi Wilayah Pesisir pantai Pacitan Untuk Pembangunan Waterfront City di Kabupaten Majene*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya





PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 92. Fax. 0422 -21238 Majene SUL - BAR

Majene, 14 Juli 2023

Nomor : B.400.3 / 368 / VII / 2023
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Yth. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar
Di -
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene, menerangkan bahwa :

Nama : AMALIA WINDAYANTI TASWIN
NIM : B022202022
Program Studi : S2 Kenotariatan
Alamat : Pangali Ali Kel. Pangali Ali Kec. Banggae Kab. Majene

Telah melaksanakan penelitian / observasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene sejak bulan Juli – September 2023 dengan Judul : "*Implikasi Hukum Terhadap Reklamasi Wilayah Pesisir Pantai Pacitan Untuk Pembangunan Waterfront City Di Kabupaten Majene*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pt. Kepala Dinas

HJ. RISMA YULIATY, S.Pd, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip: 197607292003122008



Lampiran 2 :


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. H. Abd. Malik Pattana Endang Komp. Kantor Gubernur, Vangcu, Mamuju, Telp/Fax. (0424)2325152
e-mail : ptsp@prov.sulawesi.com

IZIN LOKASI REKLAMASI
NOMOR : 01/76/ILR.B/VII/2019

A. IDENTITAS PEMOHON

1. Instansi/Unit Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Majene
2. Alamat	: Jl. Jenderal Ahmad Yani (KM.4) Poros Majene-Mamuju
3. Nomor Telp/Fax	: (0422) 21008

B. LOKASI REKLAMASI

1. Lokasi	: Pangali ol, Banggae, Labuang, Lembang, Baurung
a. Desa/Kelurahan	: Banggae dan Banggae Timur
b. Kecamatan	: Majene
c. Kabupaten	: Sulawesi Barat
d. Provinsi	: Terlampir
2. Koordinat Lokasi	: Negara
3. Status Hak Tanah	: ± 5 Hektar
4. Luasan Reklamasi	: Fasilitas Jalan dan Fasilitas Umum Penunjang Lainnya
5. Rencana Peruntukan	

C. MASA BERLAKU : 1 Juli 2019 s/d 1 Juli 2021

IZIN LOKASI REKLAMASI INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN UNTUK PENETAPAN LOKASI KEGIATAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

Diterbitkan di : Mamuju
Pada tanggal : 1 Juli 2019

a.n GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


H. BAHTIAR HS., SE. MH.
NIP.19620707 199208 1 002





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Kantor Gubernur, Rongas, Mamuju, Telp/fax. (0426)2325152
e-mail : phpsulawesibarat@gmail.com

**IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI
NOMOR : 01/76/PPK.8/VII/2019**

A. IDENTITAS PEMOHON

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Instansi/Unit Kerja | : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Majene |
| 2. Alamat | : Jl. Jenderal Ahmad Yani (KM.4) Poros Majene-Mamuju |
| 3. Nomor Telp/Fax | : (0422) 21008 |

B. LOKASI REKLAMASI

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Lokasi | |
| a. Desa/Kelurahan | : Pangali aji, Banggae, Labuang, Lembang, Baurung |
| b. Kecamatan | : Banggae dan Banggae Timur |
| c. Kabupaten | : Majene |
| d. Provinsi | : Sulawesi Barat |
| 2. Koordinat Lokasi | : Terlampir |
| 3. Luasan Reklamasi | : ± 5 Hectar |
| 4. Rencana Penunjukan | : Fasilitas Jalan dan Fasilitas Umum Penunjang Lainnya |

C. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 2 (dua) Tahun

D. MASA BERLAKU : 1 Juli 2019 s/d 1 Juli 2021

IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

Diterbitkan di : Mamuju
Pada tanggal : 4 Juli 2019

dan GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Lampiran Ketiga:



(diskusi dengan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan di Kantor Dinas Bappeda Kabupaten Majene)



(diskusi dengan Kepala Bidang Bina Marga di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

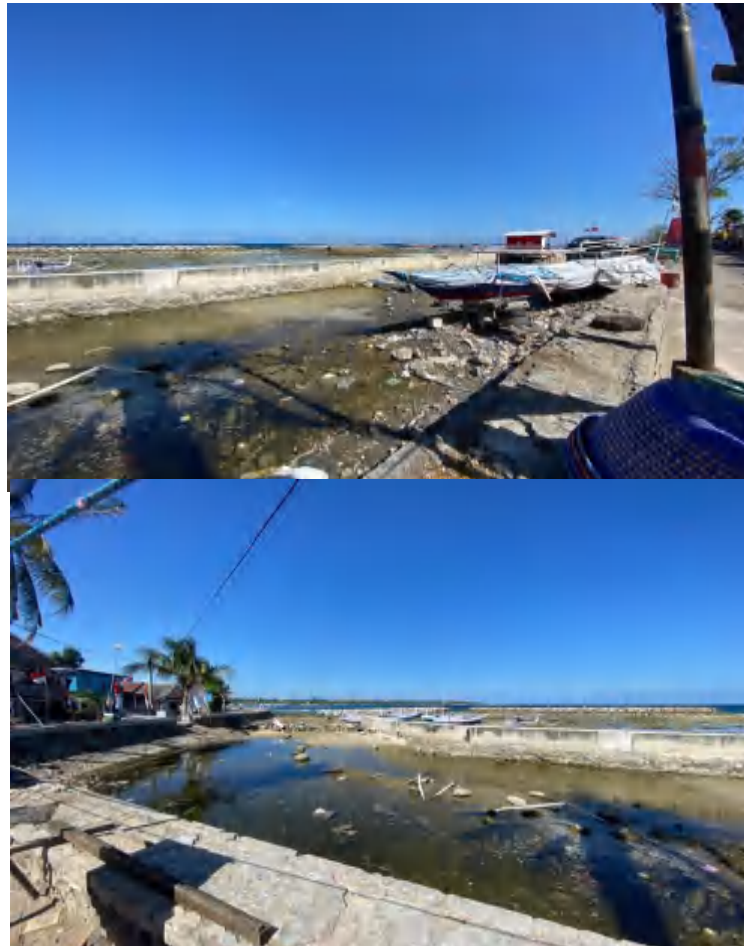


si dengan Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas kungan Hidup di Kantor Dinas Lingkuan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene



Lampiran 3

(gambar setelah reklamasi pada tahap perencanaan di Pacitan
Kabupaten Majene)



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Optimized using
trial version
www.balesio.com